



Judul : Penuhi hak pejuang, baleg DPR siapkan revisi UU Veteran
Tanggal : Minggu, 18 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penuhi Hak Pejuang Baleg DPR Siapkan Revisi UU Veteran

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa persoalan veteran tidak bisa dipersempit hanya sebagai tanggung jawab Kementerian Perencanaan (Kemhan). Pemenuhan hak-hak veteran mesti melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan perencanaan lintas sektor yang matang.

Selly menilai, selama ini urusan veteran dianggap sepenuhnya tanggung jawab Kemhan. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki peran penting dalam pemenuhan kesejahteraan veteran, bukan hanya sebatas pengelolaan taman makam pahlawan atau pemberian gelar kehormatan.

"Isu veteran ini melibatkan banyak kementerian, mulai dari Kemhan, Kemensos, Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam melihat kondisi veteran di daerah," ujar Selly dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti lemahnya konektivitas data veteran antarinstansi. Belum terintegrasinya data antara Kemhan, Kemensos, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah berdampak langsung pada terhambatnya penyaluran hak veteran.

"Akibat data yang tidak sinkron, banyak veteran yang tidak memperoleh haknya, termasuk jaminan kesehatan dan bantuan sosial," ungkapnya.

Selly menegaskan, negara tidak boleh mengabaikan nasib para veteran, terlebih mayoritas dari mereka kini telah berusia

di atas 70 tahun. Ia menilai negara harus hadir penuh dalam menjamin kehidupan layak para veteran, terutama dalam hal layanan kesehatan.

"Jangan sampai ada veteran yang masih harus bekerja sebagai penyapu jalan demi bertahan hidup. Negara seharusnya menjamin kesejahteraan mereka," tegas mantan wakil bupati Cirebon itu.

Sejalan dengan hal tersebut, anggota Baleg DPR Machfud Arifin mendukung rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Revisi ini perlu disiapkan secara matang agar dapat masuk dalam prioritas legislasi nasional.

"Kami mendorong agar draf revisi disiapkan secara komprehensif dan siap dibahas, sehingga bisa segera diusulkan sebagai prioritas perubahan undang-undang," ujar politikus Partai NasDem itu.

Dia bilang, revisi UU Veteran tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan anggaran negara. Tanpa perencanaan fiskal yang jelas, perlindungan veteran dikhawatirkan tidak berkelanjutan.

"Ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga kesiapan anggaran negara dalam jangka panjang. Harus dihitung secara matang agar keberpihakan pada veteran tidak bersifat sementara," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (DPP LVRI) turut mendorong agar revisi UU Nomor 15 Tahun 2012 segera diprioritaskan. ■ PYB